

KETEGANGAN ANTAR KELOMPOK AGAMA PADA MASA ORDE LAMA SAMPAI AWAL ORDE BARU: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik¹

Amos Sukanto

Abstrak

Sejak masa awal kemerdekaan sampai masa munculnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 Indonesia banyak diwarnai ketegangan antara kelompok Islam, Islam nasionalis, *abangan*, dan Kristen. Ketegangan tersebut tampak dalam perumusan dasar negara RI yang diakhiri dengan satu *modus vivendi* dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Namun sehari setelah Indonesia merdeka ketujuh kalimat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut dihapus. Pada saat inilah bibit ketegangan antara Islam dengan Kristen mulai muncul. Tahun 1950-an terjadi kebangkitan aliran kepercayaan (Kejawen), penganut gerakan ini menjadi basis utama bagi massa PKI. PKI merupakan oposisi utama bagi ideologi maupun politik Islam. Ketika PKI gagal mengadakan revolusi pada tahun 1965 banyak orang Islam yang membantu Angkatan Darat dalam menumpas para pengikut PKI. Karena kecewa maka banyak para pengikut PKI yang *abangan* memeluk agama Kristen. Konversi ke Agama Kristen dikalangan *abangan* ini telah menggeser kelompok yang dianggap ancaman bagi Islam dari kelompok *abangan* ke kelompok Kristen.

Pendahuluan

Pada masa menjelang kemerdekaan sampai munculnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 panggung sejarah Indonesia lebih banyak diwarnai ketegangan antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam ketimbang Islam *vis-à-vis* Kristen. Namun begitu, tidak bisa dikatakan bahwa pada masa ini sama sekali tidak ada ketegangan antara Islam *vis-à-vis* Kristen. Perjuangan para elit Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara yang kemudian melahirkan Piagam Jakarta menyebabkan suatu pergulatan yang tiada henti-hentinya antara kelompok nasionalis (yang tidak menghendaki Islam sebagai dasar negara

¹Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan komentar yang diberikan oleh ibu Farsijana Adeney-Risakotta, Ph.D. (UKDW Yogyakarta).

termasuk di dalamnya wakil Kristen) berhadapan dengan kelompok Islam dari masa menjelang kemerdekaan sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isu tentang Piagam Jakarta ini juga menjadi salah satu faktor penentu bagi hubungan Islam dengan Kristen di Indonesia pada masa-masa berikutnya bahkan terus berlangsung sampai sekarang (era Reformasi).

Di tingkat *grass roots* sejak tahun 1948 berlangsung ketegangan antara pendukung PKI yang kebanyakan berasal dari kalangan *abangan* dengan santri² (Islam) dan mencapai puncaknya pada tahun 1965. Akibat peristiwa G 30 S PKI dan setelah pemerintah mengharuskan setiap rakyat Indonesia harus memilih salah satu dari agama yang diakui oleh pemerintah dan supaya tidak dianggap PKI (atheis) banyak kalangan *abangan* mengalami konversi ke Kristen. Peristiwa konversi ini menjadi titik awal konflik fisik³ antara Islam *vis-à-vis* Kristen pada masa awal Orde Baru.

Tulisan ini akan membahas dua peristiwa penting tersebut yaitu perjumpaan kelompok Islam *vis-à-vis* kelompok Nasionalis pada masa sekitar perumusan dasar negara (Piagam Jakarta) dan konflik Islam-Kristen setelah peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965. Secara rinci akan dibahas dalam tiga sub pokok bahasan yaitu perjumpaan antara: Islam *vis-à-vis* Nasionalis yang terjadi pada masa sekitar Proklamasi Kemerdekaan-Dekrit Presiden 5 Juli 1959; Islam *vis-à-vis* *abangan* sejak tahun 1948 sampai tahun 1965; dan Islam *vis-à-vis* Kristen dari tahun 1965 sampai awal Orde Baru.

²Geertz melihat dua perbedaan antara kelompok *abangan* dengan santri, “*Comparing the abangan and santri variants of the Modjokuto religious pattern, two very striking general differences, other than their differential evaluation of Islamic orthodoxy, are immediately apparent. In the first place, abangans are fairly indifferent to doctrine but fascinated with ritual detail, while among the santris the concern with doctrine almost entirely overshadows the already attenuated ritualistic aspects of Islam*” (1960:126). Lebih lanjut Geertz menyatakan bahwa, “*An abangan knows when to give a slametan and what the major foods should be >porridge for a birth, pancakes for a death*” (1960:127) sedangkan “*For the santri the basic rituals are also important >particularly the prayers, the conscientious performance of which is taken by santris and non-santris alike to be the distinguishing mark of a true santri—...*” (1960:127). Di daerah Ponorogo Islam *abangan* oleh penduduk lokal disebut Islam *marmoyo* (Islam dagelan atau Islam tidak serius). Mereka disebut Islam karena ada anggapan secara umum bahwa setelah di sunat dengan sendirinya dianggap Islam. Istilah lain untuk menyebut Islam *abangan* adalah Islam *nabiti* yaitu kepanjangan dari *sunat-rabi-mati* (khitan, menikah, dan meninggal). Mereka disebut Islam karena menjalankan tiga upacara peralihan Islam dalam fase kehidupan manusia yaitu ketika mereka di sunat (khitan), ketika menikah mereka diajari melafalkan syahadat, dan ketika meninggal dimakamkan menurut tata cara Islam (Hamdi 2009:71-73). Dilihat dari afiliasi agama mereka sering disebut dengan Muslim awam, kelompok non-jama’ah, kejawen atau *abangan*. Sebutan tersebut dikonstraskan dengan pendukung partai politik Islam yaitu NU dan Masyumi yang sering disebut dengan sebutan Muslim taat, kelompok jama’ah atau santri (Tholkhah, 2001:121).

³Misalnya pada awal tahun 1967 timbul kesulitan-kesulitan sehubungan dibangunnya sebuah gereja kecil Metodis di Meulaboh (Aceh barat) dan pada tanggal 1 Oktober 1967 pemuda-pemuda Islam di Makasar (Sulawesi Selatan) merusak perabot berbagai gereja (Boland 1985:241; Feillard 1999:142-143).

1. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI-Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Islam *vis-à-vis* Nasionalis

Pada akhir masa penjajahan Jepang elit modern politik Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok: Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, Islam sekular meskipun mereka Islam namun mereka tidak menginginkan Islam sebagai dasar negara, komunis, dan Kristen. Masing-masing kelompok ini mengusung ideologinya sendiri-sendiri. Namun dalam perjuangan ideologi negara faksi-faksi ini bisa disederhanakan menjadi dua kelompok. Kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan agama yaitu kelompok Islam dan kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan ideologi non-agama yaitu kelompok nasionalis. Akibatnya ketegangan pada masa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia lebih banyak disebabkan oleh perbedaan ideologi negara dan ketegangan tersebut hanya terjadi pada tingkat elit politik para pendiri negara. Hal ini tampak pada perumusan ideologi negara Republik Indonesia yang akan dibentuk.

Dengan kian mendekatnya invasi negara-negara sekutu, tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengulangi janjinya yang pernah di sampaikan pada tanggal 7 September 1944 tentang kemerdekaan Indonesia. Deklarasi pada tanggal 1 Maret tersebut kemudian menghasilkan suatu panitia yang disebut dengan panitia 62. Pada hari terakhir sidang ini tepatnya tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan suatu pidato yang terkenal dengan lahirnya Pantja Sila (Boland 1985:23). Perbedaan dua kelompok tentang dasar negara tampak ketika bunyi sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dipersoalkan oleh kelompok Islam. Menurut kelompok Islam pencantuman sila pertama tidaklah jelas, maka perlu ditambah dengan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Penambahan tujuh kata ini kemudian menimbulkan perdebatan yang *alot* antara kelompok nasionalis (di dalamnya terdapat juga tokoh Kristen) dengan kelompok Islam. Untuk memecahkan ketegangan tersebut dibentuk panitia 9⁴ (Maarif 1985:107; Boland 1985:27; Anshari 1997:28).

Melalui pergumulan yang sulit pada tanggal 22 Juni 1945 dicapai satu *modus vivendi* dengan merumuskan suatu *gentlemen's agreement* tentang Pembukaan Undang-undang Dasar yang oleh Yamin dokumen ini dinamakan Piagam Jakarta – *The Jakarta Charter* (Maarif 1985:107; Boland 1985:27; Anshari 1997:27-43). Dalam Piagam Jakarta ini tujuh kata yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tetap dipertahankan. Ini berarti keinginan kelompok Islam sampai pada detik ini paling tidak cukup terakomodasi dan bisa dianggap sebagai kemenangan politik kelompok Islam.

⁴Disebut 9 karena terdiri dari 9 orang. Mereka itu adalah Soekarno (Islam, nasionalis); Mohammad Hatta (Islam, nasionalis); A. A. Maramis (Kristen); Abikoesno Tjokrosuejiwo (PSII); Abdul Kahar Muzakir (Muhammadiyah); Haji Agus Salim (Islam); Achmad Soebarjo (Islam, nasionalis); Abdul Wahid Hasjim (NU); Muhammad Yamin (Islam, nasionalis).

Namun keputusan ini tidak berarti mengakhiri perdebatan yang ada. Dalam rapat-rapat berikutnya terdapat keberatan-keberatan baik yang berasal dari Kristen maupun orang Islam yang berpendidikan barat dan *abangan* seperti Latuharhary (seorang yang beragama Kristen Protestan, anggota BPUPKI), Hoesein Djajadiningrat (pemeluk Islam berpendidikan barat) dan Wongsonegoro (orang Jawa berpaham liberal) (Maarif 1985:208; Boland 1985:31; Anshari 1997:31-32). Namun keberatan-keberatan ini dapat dikendalikan oleh Soekarno.

Kemenangan kubu Islam ini berubah ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 –tepat sehari setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya– atas keberatan dari kelompok nasionalis dan orang Kristen dari Indonesia bagian Timur tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut dihapus dari naskah pembukaan UUD 1945.⁵ Karena yang dianggap penyebab pertama pencoretan tujuh kata ini adalah orang Kristen maka peristiwa ini menjadi titik awal ketegangan antara Islam *vis-à-vis* Kristen. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah kelompok Islam merasa dikhianati. Sebagaimana diungkapkan oleh Anshari:

Segera setelah para nasionalis yang Islami mengetahui bahwa, Indonesia merdeka, yang turut mereka perjuangkan, bahkan berdasarkan Piagam Jakarta pun tidak, maka “*the majority of the Muslim population felt disappointed*” (1997:57).

Kekalahan ini oleh generasi Islam berikutnya dipandang sebagai kekalahan dan kelemahan politik wakil-wakil umat Islam (Maarif 1985:109; Latif 2005:342-345). Natsir melihat keberatan orang Kristen dari Indonesia Timur tersebut disebut sebagai ultimatum.

Isi pesan itu pendek saja. Yaitu: ada 7 kata yang tercantum dalam Muqaddimah Undang-undang Dasar Republik, yang harus dicabut, katanya. Kalau tidak, Umat Kristen di Indonesia sebelah Timur “*tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia*”, yang baru diproklamirkan itu. Tujuh kata-kata itu berbunyi: “*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Utusan tersebut tidak untuk mengadakan diskusi tentang persoalannya. Hanya menyampaikan satu peringatan. Titik!. Tak perlu bicara lagi. Terserah apakah pesan diterima atau tidak. Asal tahu apa konsekuensinya. Ini berupa *ultimatum* (Natsir 1991:45).

Peristiwa ini menjadi salah satu ingatan buruk bagi kelompok Islam yang menginginkan Indonesia berdasar Syariat Islam. Meskipun tidak terjadi konflik terbuka secara langsung Islam *vis-à-vis* Kristen, namun peristiwa ini menjadi

⁵Uraian lengkap pembahasan peristiwa ini bisa dibaca dalam Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta: Tintamas, 1978):454-457 dan Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: GemaInsani Press, 1997):50-58.

faktor yang sangat menentukan bagi hubungan Islam-Kristen di Indonesia pada masa mendatang. Bagi sebagian kelompok Islam radikal di Indonesia kelompok Kristen diyakini sebagai salah satu pengganjal sulitnya diberlakukannya Piagam Jakarta (Suara Hidayatullah September 2000). Masalah Piagam Jakarta ini menjadi salah satu faktor penting penyebab disharmonis hubungan Islam-Kristen pada masa pasca-kolonialisme.

Bentuk kekecewaan umat Islam pada keputusan tersebut muncul ke permukaan dalam bentuk pemberontakan di beberapa daerah dengan tujuan mendirikan negara Islam. Misalnya, di Jawa Barat Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 memproklamasikan Negara Islam Indonesia.⁶ Kahar Muzakar⁷ mengadakan pemberontakan di Sulawesi Selatan pada tahun 1952 dan Daud Beure'eh memproklamasikan Negara Islam di Aceh sebagai bagaian dari Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosuwirjo. Namun pemberontakan-pemberontakan ini justru melemahkan perjuangan politik Islam pada masa Orde Baru dan menguntungkan bagi kelompok *abangan* dan Kristen karena penguasa Orde Baru selalu curiga terhadap politik Islam. Hal ini tampak pada kebijakan militer Orde Baru yang memerangi kekuatan “ekstrim kiri” (komunis) dan “ekstrim kanan” (separatis Muslim) (Hefner 2000:173).

Pada masa Pemilu 1955 perbedaan-perbedaan antar kelompok di seluruh ranah tanah air lebih dipertajam dan dipertegas lagi lewat pembentukan partai politik. Karena partai politik tidak hanya melibatkan kelompok elit tetapi juga dukungan massa maka jika pada masa seputar proklamasi kemerdekaan RI yang bersitegang hanya ditingkat elit, pada masa pasca-pemilu 1955 ketegangan tersebut melibatkan seluruh komponen kelompok masyarakat Indonesia termasuk perbedaan komponen kelompok keagamaan. Hal ini diperparah ketika banyak partai politik mengusung bendera agama. Sehingga konflik politik selalu tumpang tindih dengan konflik agama, begitu juga sebaliknya.

Pada masa Pemilu 1955 jika dilihat dari perjuangan dasar negara partai yang mengikuti Pemilu bisa dibagi dalam tiga kubu yaitu: kubu Islam, Nasionalis, dan Sosial-ekonomi. Pada masa ini lagi-lagi sebagian kubu Islam yang menginginkan Indonesia berdasarkan Syariat Islam mengalami kekecewaan. Hal ini disebabkan dalam Pemilu 1955 tidak ada satupun di antara aliran-aliran pokok dalam masyarakat Indonesia yang tampil sebagai pemenang. Sehingga dalam konstituante tidak ada mayoritas tunggal. Partai-partai Islam atau blok Islam yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara yaitu Masjumi, NU, PSII, Perti, AKUI, PPTI, Gerakan Pilihan Sunda, L.M.Idrus Effendi meraih 230 kursi. Mereka harus berhadapan dengan Blok nasionalis yang memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara yaitu PNI, PKI, Parkindo, Partai Katolik, PSI, IPKI, PRN, dll., meraih 274 kursi, dan blok sosial-ekonomi memperoleh kursi

⁶Mengenai pemberontakan Kartosuwirjo lihat C. van Dick, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981).

⁷Pembahasan secara detail tentang Gerakan Darul Islam di Sulawesi Selatan lihat Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Pejuang Sampai Pemberontak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992).

10.⁸ Dengan perolehan kursi sebanyak 230 maka harapan blok Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara menjadi semakin tidak realistis. Hal ini terbukti ketika Konstituante yang sudah terbentuk memulai sidangnya pada tanggal 10 November 1956 di Bandung tidak bisa mencapai kata sepakat tentang masalah rumusan dasar negara yaitu, Negara Pancasila atau Negara Islam (Maarif 1985:75; Boland 1985:85; Anshari 1997:65-107). Kebuntuan membuahkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Presiden Sukarno menyatakan kembali ke UUD 1945 dan setelah ini Indonesia memasuki masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin (Maarif 1985:75; Anshari 1997:109-115). Meskipun begitu perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara RI tidak berarti sudah berakhir. Karena dalam setiap tahapan sejarah RI selalu ada kelompok Islam yang berjuang untuk cita-cita tersebut.

2. Tahun 1948–Revolusi PKI 1965: Ketegangan antara Islam *vis-à-vis* *abangan* pendukung PKI

Ketegangan dalam bentuk konflik fisik antara kelompok *abangan* pendukung PKI dengan *santri* sudah terjadi sejak September 1948. Pada tahun itu para milisi-milisi PKI membantai para pejabat yang terkait dengan Masyumi dan PNI. Seperti yang diungkapkan oleh George Kahin bahwa “orang-orang Masyumi tampak sebagai korban satu-satunya; kadang mereka sebatas dirampok, tapi tidak jarang pula disiksa dan dibantai” (Hefner 2001:99). Gambaran kekejaman PKI terhadap para tokoh Masyumi dan PNI dapat dilihat dari laporan surat kabar Tionghoa seperti berikut:

Semoea pemimpin Masjoemi dan P.N.I ditangkep atawa diboenoeh dengan tidak dipreksa poela. Kakedjeman di kota Madioen djadi memoentjak, koetika barisan ‘warok’ Ponorogo masoek kota dengan bersendjata revolver dan klewang. Dimana ada terdapat orang-orang Masjoemi, P.N.I. atawa jang ditjoerigaken, zonder banjak tjingtjong lagi lantas ditembak. Belon poeas dengan ini tjara, korban itoe laloe disamperi dan klewangnja dikasi bekerdja oentoeok pisahkan kepalanja sang korban dari toeboehnja. ... (Poeze 1948:217).

Di desa-desa, kalangan *abangan* pendukung PKI yang khawatir mendengar laporan bahwa pemimpin mereka akan dibunuh juga mulai membunuh tetangga mereka kalangan *santri*. Setelah Madiun dikuasai pemerintah, para *santri* di sekitar Surakarta melakukan aksi balas dendam terhadap para *abangan* (Hefner 2001:98-99).

⁸Pembagian blok berdasarkan pembagian yang dibuat oleh Adnan Buyung Nasution dalam *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992).

Tahun 1950-an gerakan aliran kepercayaan mengalami kebangkitan yang cukup signifikan. Fenomena ini muncul bukan hanya di kalangan *priyayi* namun juga muncul di kalangan *abangan* —kelompok ini menjadi basis utama massa PKI—. Beberapa sarjana Barat yang mengkaji fenomena ini misalnya Justus M. Van Der Kroef,⁹ Niels Mulder,¹⁰ Rahmat Subagya (nama aslinya J. W. M. Bakker, S.J. lih. Steenbrink 2002:233 catatan kaki 21),¹¹ dan Paul Stange.¹²

Pada tahun 1951 Kementrian Agama RI membuat daftar aliran kepercayaan baru. Pada tahun tersebut terdapat 73 kelompok (Subagya 1989:9).¹³ Tahun 1956 Departemen Agama di Yogyakarta, Jawa tengah mengumumkan bahwa ada 63 sekte agama di Pulau Jawa, dari 63 kelompok tersebut 35 terdapat di Jawa Tengah, 22 di Jawa Barat dan 6 di Jawa Timur (Kroef 1961:18). Jumlah ini mengalami terus peningkatan bahkan menurut Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Timur sampai tahun 1959 di wilayah tersebut jumlahnya sudah mencapai angka 100 (Kroef 1961:18). Kelompok aliran kepercayaan ini jumlahnya terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 1965 mencapai jumlah yang tidak kurang dari 300 kelompok (Subagya 1989:9).

Melihat perkembangan seperti tersebut di atas, pada tahun 1952 Departemen Agama yang didominasi oleh orang-orang Islam mengajukan satu definisi minimum tentang agama yaitu: “ada nabi, ada kitab suci, dan pengakuan internasional” (Subagya 1989:116). Definisi ini tentunya hanya menguntungkan bagi agama Islam dan Kristen dan secara implisit tidak mengakui aliran kepercayaan sebagai agama. Tujuan utama dari definisi ini adalah untuk menekan perkembangan aliran kepercayaan. Perkembangan aliran kepercayaan ini dianggap membahayakan bagi Islam dan perjuangan politik kubu Islam. Mengapa? Karena aliran pengikut kepercayaan bisa dikatakan sebagai basis pendukung utama Partai Komunis Indonesia. Ideologi Partai Komunis Indonesia tentunya sangat bersebrangan dengan ideologi Islam (Tholkhah 2001).

Definisi tersebut di atas mendapat oposisi dari Hindu Bali sehingga ditarik mundur. Namun bukan berarti kelompok Islam mundur, mereka tetap berusaha mencari cara bagaimana supaya tetap bisa mengontrol perkembangan aliran kepercayaan. Untuk tetap bisa mengawasi aliran-aliran kepercayaan tersebut maka pada bulan Oktober tahun 1954 Departemen Agama membentuk Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Fungsi badan ini adalah

⁹ Lihat J. M. van der Kroef, “New Religious Sects in Java,” *Far Eastern Survey* 30 (1961):2.

¹⁰ Lihat Niels Mulder, *Kebatinan dan Hidup Seharian-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*, (Jakarta: PT Gramedia, 1984).

¹¹ Lihat Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).

¹² Lihat Paul Stange, *Politik Perhatian: Rasa Dalam Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: LKiS, 1998).

¹³ Departemen Agama mencatat bahwa pada tahun 1952 di Jawa Barat muncul 29 sekte agama baru sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 (Kroef 1961:18).

sebagai pengawas gerakan-gerakan spiritual yang tidak sepaham dengan Islam (Subagya 1989:117). Afandi menganggap PAKEM sebagai cara negara melindungi agama (Afandi 2009), sedangkan Mulder menganggap PAKEM sebagai: “*In hands of the Ministry of Religion, Pakem became the watchdog against utterly anti-Islamic spiritual movements*” (2005:23). Usaha untuk menekan aliran kepercayaan ini dimunculkan lagi pada tahun 1961. Departemen Agama kembali mengajukan definisi agama. Menurut Departemen Agama, agama harus mempunyai kitab suci, nabi, kekuasaan mutlak Tuhan Yang Maha Esa dan suatu sistem hukum bagi para penganutnya (Mulder 1984:6). Sangat jelas bahwa usulan definisi ini merupakan langkah strategis dari orang-orang Islam untuk menekan perkembangan aliran kepercayaan.

Tahun 1957-an PKI berhasil membangun kembali kader-kadernya dan pada tahun 1959 PKI mengawali kampanye pertama tanah pertaniannya (Anderson 2000:235-236). Kampanye petani ini kian meningkat setelah 1959 sehingga membawa PKI dalam konflik yang terus berkembang dengan umat Islam dan militer. Satu rancangan UU penyewaan tanah dan pembagian hasil diloloskan DPR di akhir 1959 dan pada tahun 1960 UU Pertanahan disetujui (Hefner 2001:101). Gerakan *land reform* ini oleh kalangan santri dilihat sebagai ancaman terhadap agama dan cara hidup mereka (Anderson 2000:236; Feillard 1999:71). Mengapa? Karena gerakan *land reform* ini adalah gerakan memperjuangkan pembebasan tanah bagi orang-orang yang tidak punya tanah. Padahal para penguasa tanah di desa biasanya adalah para pejabat, haji dan pemimpin agama,¹⁴ sehingga sejak program *land reform* dikampanyekan terjadi ketegangan berbau religio komunal antara santri dengan pendukung komunis (sebagian besar adalah *abangan*).¹⁵ Ketegangan dan perselisihan berbagai kepentingan ini diakhiri dengan revolusi PKI pada tanggal 30 September 1965. Revolusi ini mengalami kegagalan karena PKI tidak bisa mencapai tujuannya dan setelah peristiwa tersebut ideologi komunis dilarang hidup di Indonesia.

3. Revolusi PKI 1965 – Awal Orde Baru (1970): Islam *vis-à-vis* Kristen

Revolusi PKI tahun 1965 bisa dikatakan merupakan titik awal perubahan dalam banyak bidang kehidupan di Indonesia baik kehidupan politik maupun kehidupan agama. Dalam kehidupan politik, penguasa Orde Baru berusaha melenyapkan ideologi Komunis di Indonesia. Pelenyapan ideologi Komunis ini tentunya mendapat sambutan secara baik dari kelompok Islam. Bahkan kelompok

¹⁴ Menurut Margo L. Lyon yang tahun-tahun tersebut banyak melakukan penelitian di Indonesia menyatakan bahwa: Di sebagian besar daerah pedesaan Jawa, terdapat ketidakserasian antara luas tanah-tanah milik di dalam desa-desa tersebut. Tanah *bengkok* mungkin berhektar-hektar lebih luas daripada luas tanah milik rata-rata penduduk desa lainnya. Luas tanah wakaf mungkin beratus-ratus hektar di daerah-daerah tempat tinggal masyarakat Islam kaya ataupun sekolah Islam besar (2008:210).

¹⁵Lihat Rex Alfred Mortimer, *The Indonesian Communist Party and Land Reform, 1959-1965*, MonashPAPERON Southeast Asia No.1 (Clayton, Victoria: Monash University, 1972).

Islam banyak membantu pemerintah dalam menumpas anggota PKI. Setelah ideologi Komunis dilarang, Islam menghadapi kelompok baru yaitu kelompok Kristen. Maka sejak tahun 1965 konflik agama yang lebih dominan muncul ke permukaan adalah konflik antara Islam *vis-à-vis* Kristen. Konflik Islam *vis-à-vis* Kristen terjadi bukan hanya pada tataran elit –seperti yang terjadi pada seputar pembentukan Piagam Jakarta dan sedudahnya– namun juga merambah pada aras *grass roots*.

3.1. Konversi ke Kristen

Akibat kegagalan revolusi PKI 1965 terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap para pendukung PKI yang sebagian besar berasal dari kaum *abangan*. Tingkat pembantaian ini berakhir pada akhir Desember 1965. Sikap Islam terhadap PKI sangat tegas dan mendukung penganyangan terhadap pendukung PKI. Misalnya pada tanggal 7 Oktober 1965 harian terbitan NU Duta Masyarakat menyerukan pembasmian PKI dan antek-anteknya yang terlibat dalam Gerakan 30 September.¹⁶

. . . di tajuk rencananya tanggal 7 Oktober 1965 menyatakan: bahwa keputusan “yang paling tepat” dan paling baik adalah memberantasnya (para komunis), “akar-akarnya”, komplotannya, pembelanya, dan semua yang bertindak bersamanya, baik secara terbuka atau tersembunyi (Duta Masyarakat 7 Oktober 1965 dikutip oleh Feillard 1999:72).

Demikian juga dengan Muhammadiyah pada bulan November 1965 mengeluarkan fatwa melalui Suara Muhammadiyah pada tanggal 9 November 1965 yang menyebut penganyangan orang-orang PKI hukumnya adalah wajib namun harus dilakukan tanpa kekerasan. Isi fatwa tersebut sebagai berikut:

“Karena itu, adalah benar bagi Muhammadiyah, bersama dengan (para pemimpin) gerakan pemudanya, selama rapat kilat di Jakarta, tanggal 9-11 November 1965, dengan bertawakal kepada Allah, mengeluarkan pernyataan ini: PENUMPASAN GESTAPU/PKI DAN NEKOLIM ADALAH MERUPAKAN IBADAT. . . . Ibadat ini tidaklah hanya bersifat sunah tetapi wajib, bahkan merupakan *wajib `ain* (yaitu bukan hanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu badan atas nama seluruh umat Islam, tetapi merupakan kewajiban setiap orang

¹⁶Dalam surat edaran 9 Oktober yang dikirimkan keseluruh cabangnya, PBNU menggambarkan Partai Komunis dengan kata-kata sebagai berikut: “Petualangan tak bertanggung jawab ‘Gerakan 30 September’ yang kontrarevolusioner, yang didalangi kaum komunis . . . mengingatkan kita pada petualangan tak bertanggungjawab yang mereka lancarkan pada 18 September 1948 di Madiun, dan sekali lagi membuktikan kekejaman dan kebiadaban kaum atheis setiap kali mereka menjalankan terornya (Fealy 2003:333).

Islam secara perseorangan) . . . “Dan karena aksi serta perjuangan ini harus dilakukan dengan mengkonsolidasikan kekuatan kita, baik mental, fisik, dan material, karena itu aksi dan perjuangan ini tidaklah kurang dari suatu JIHAD. . . . (Dikutip oleh Boland 1985:153 bnd. Feillard 1999:73).

Karena penumpasan terhadap para pendukung PKI mendapat legitimasi pembenaran dari kelompok Islam (NU dan Muhammadiyah) maka tindakan pembunuhan terhadap para pendukung PKI bukan hanya dilakukan oleh ABRI tetapi juga oleh kelompok-kelompok Islam seperti NU dengan aktivis mudanya Ansor (Crouch 1999:162; Feillard 1999:73; Beatty 2001:301). Hal ini sangat berbeda dengan yang disampaikan Kompas (Surat Kabar milik Katolik) yang menyatakan: “dendam adalah perasaan perang yang tidak beriman” (Feillard 1999:72-73).

Untuk menekan kekuatan PKI, pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 menyatakan bahwa ateisme dilarang dan pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa setiap warga Indonesia harus memeluk salah satu dari lima agama yang diakui oleh pemerintah. Karena kecewa dengan Islam atas keikutsertaan dalam pembantaian tersebut, maka banyak pendukung PKI yang *abangan* terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengalami konversi ke Kristen Protestan, Katolik¹⁷ dan Hindu.¹⁸ Sebagaimana diungkapkan oleh Boland bahwa:

Pembunuhan besar-besaran terhadap mereka yang disebut sebagai orang komunis yang ateis oleh mereka yang beragama, khususnya kelompok-kelompok pemuda Muslim, telah menyebabkan terpilihnya agama Kristen, karena orang-orang Kristen tidaklah terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut (1985:243).

Tentu ungkapan Boland ini tidak sepenuhnya benar bahwa orang-orang Kristen tidak terlibat dalam pembunuhan. Menurut beberapa hasil penelitian para pemuda Katolik dan Kristen di beberapa wilayah juga ikut serta dalam pembantaian terhadap para penganut PKI misalnya: di Medan (Crouch 1999:169), Jawa Tengah dan Jawa Timur (Langenberg 2000:87).

¹⁷Menurut catatan dari Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial di Jawa jumlah Gereja Roma Katolik bertambah dua kali lipat dari 125.486 menjadi 241.387 pada tahun 1965 (Lihat Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial, *Ichtisar Statistik Tentang Geredja Katolik di Indonesia: 1949-1967* (Jakarta: KWI, 1968).

¹⁸Regulasi pemerintah ini menyebabkan banyak terjadi konversi agama pada aras lokal. Lihat untuk studi tentang konversi dari Hindu ke Islam: Robert W. Hefner, *Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*, (Princeton: Princeton University Press, 1985); untuk studi konversi ke Kristen Protestan lihat Robert W. Hefner, “Of Faith and Commitment: Christian Conversion in Muslim Java,” dalam Hefner, R. W. ed., *Conversion to Christianity: Historical and Anthropological Perspectives on a Great Transformation*, (Berkeley: University of California Press, 1993):99-125.

Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan kawasan UGM juga menunjukkan dalam membalas kegiatan-kegiatan Komunis kelompok nasionalis, Muslim dan Kristen mengorganisir pemudanya ke dalam kekuatan-kekuatan tempur. Di kalangan Kristen terdapat kelompok pemuda Kristen yang menyebut dirinya dengan barisan Pengawal Yesus (2000:224). Namun jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga tidak menonjol.

Proses konversi ke Kristen terjadi di berbagai wilayah Indonesia misalnya: Gereja Batak Karo di Sumatera Utara maju secara pesat semenjak kemerdekaan dan terutama setelah kudeta tahun 1965 secara besar-besaran menarik penganut agama Kristen (Jones 1985:123). Dalam satu setengah tahun saja (Juni 1966 – November 1967) jumlahnya meningkat sebanyak 25.000 orang, yaitu tambahan sebanyak 83% melebihi jumlah anggota yang sebelumnya berjumlah 30.000 orang (Cooley 1968:71). Demikian juga di Pulau Timor dan di Jawa Timur, Jawa Tengah setelah peristiwa tahun 1965 gereja mendapat tambahan jumlah pengikut secara pesat.

Islam-pun mendapat umat yang baru. Pranowo dalam penelitiannya di sebuah desa di Magelang menunjukkan bahwa banyak orang *abangan* yang pindah ke Islam. Hal ini disebabkan peristiwa kekerasan kepada orang *abangan* tidak terjadi di wilayah tersebut.¹⁹

3.2. Respons Kaum Islam

Perkembangan jumlah penganut Kristen secara cepat pada pertengahan tahun 1960-an tersebut telah mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan tersendiri di kalangan Islam. Oleh orang Islam perkembangan ini dianggap sebagai permainan kotor dari orang-orang Kristen. Sehingga peristiwa ini semakin menambah konflik terbuka antara Islam dengan Kristen. Bagi kaum Islam perlindungan Gereja yang diberikan kepada mantan anggota PKI dianggap sebagai tindakan mengambil keuntungan dari krisis politik yang sedang berlangsung (memancing di air keruh). Bahkan ada dari kalangan Islam yang menduga bahwa peristiwa konversi secara masif ini terjadi atas dukungan dari pemerintahan Orde Baru yaitu untuk menangkis komunis sekaligus meminimalkan pengaruh Islam (Shihab 1998:173-174). Hal ini dapat dipahami karena bagi Orde Baru ada dua kekuatan yang perlu dihadapi yaitu PKI dan Islam. Penguasa Orde Baru mempunyai ingatan buruk tentang berbagai pemberontakan Islam untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Kegelisahan kalangan Islam tersebut kemudian muncul ke permukaan dalam berbagai bentuk:

¹⁹Lihat lebih lengkap tentang perkembangan Islam di konteks lokal dari tahun 1965 sampai zaman modern. M. Bambang Pranowo, "Partai Politik dan Islamisasi di Pedesaan Jawa", dalam *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1993): 178-195.

a. Menerbitkan literatur-literatur yang bersifat apologetik dan polemik antara Islam dengan Kristen

Publikasi buku yang bersifat apologetik dan polemik antara Islam dengan Kristen sudah terjadi sejak masa kolonial. Misalnya A. D. Haanie pada tahun 1929 menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Islam Menentang Kraemer* (Yogyakarta: Penyiaran Islam, 1925). Buku ini merupakan reaksi Islam terhadap berbagai tulisan seorang misionaris Kristen yang bernama Hendrik Kraemer. Pada masa kemerdekaan penggunaan Kitab Suci lawannya (Alkitab untuk membuktikan Muhammad dan Al-Qur'an untuk membuktikan Yesus Kristus) untuk mengukuhkan atau membuktikan bahwa nabi junjungannya juga disebut dalam kitab lawannya mulai bermunculan. Misalnya tulisan Hasbullah Bakry, *Isa Dalam Qur'an Muhammad Dalam Bible* (Solo: Siti Syamsiah, 1959) merupakan tanggapan atas tulisan F.L. Bakker seorang sarjana Belanda yang berjudul *Tuhan Yesus Dalam Agama Islam* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1957).

Perang dingin yang sudah terjadi ini menjadi semakin memanas menjelang dan sesudah tahun 1965. Buku yang diterbitkan bukan hanya bersifat apologetik atas doktrin agama Islam tetapi mulai mencurigai aktivitas misi agama Kristen. Salah satu tulisan yang menyerang aktivitas misi Kristen adalah suntingan Bisjron A. Wardy dalam bentuk pamflet yang berjudul *Memahami Kegiatan Nasrani* yang diterbitkan tahun 1964. Pamflet ini oleh kalangan Islam diduga berasal dari hasil pertemuan gabungan Gereja-gereja Protestan dan Gereja Katolik Roma di Malang pada tahun 1962. Isi pokok dari pamflet adalah program kristenisasi di Jawa dalam tempo 20 tahun dan seluruh Indonesia dalam tempo 50 tahun. Adapun metode yang digunakan dengan cara meningkatkan jumlah sekolah Kristen, membuka sekolah teologi di kota Muslim, mendorong laki-laki Kristen untuk menikahi wanita Muslim, membangun rumah sakit, membangun gereja dekat dengan masjid (Ropi 1999:98). Isi pamflet ini berpengaruh bagi hubungan Islam-Kristen di Indonesia. Sejak tahun 1965 hal-hal yang ditakutkan kelompok Islam atas kelompok Kristen adalah seputar isi pamflet ini. Meskipun keotentikan dari pamflet ini secara umum ditolak oleh kalangan Kristen.

Pelbagai publikasi media tertulis tersebut semakin meningkatkan ketegangan hubungan Islam dengan Kristen baik secara politis maupun pada tataran praktis, artinya sebelum peristiwa konversi tahun 1965 ketegangan pada aras media sudah terjadi dan diperparah setelah terjadi konversi ke Kristen secara masif paska revolusi PKI 1965. Peristiwa konversi ke Kristen secara masif oleh pihak Islam dianggap sebagai penggenapan dari isi pamflet di atas. Sehingga cukup beralasan jika kelompok Islam mulai terancam dengan aktivitas misi Kristen.

b. Konflik Fisik di tingkat grass roots

Jika dalam masa 1945 sampai 1965 tidak terdapat konflik secara fisik antara Islam dengan Kristen maka paska tahun 1965 terjadi perubahan baru

bentuk hubungan Islam *vis-à-vis* Kristen yaitu mulai diwarnai dengan kekerasan secara fisik. Misalnya pada awal tahun 1967 timbul kesulitan-kesulitan sehubungan dibangunnya sebuah gereja kecil Metodis di Meulaboh (Aceh barat) dan pada tanggal 1 Oktober 1967 pemuda-pemuda Islam di Makasar (Sulawesi Selatan) merusak perabot berbagai gereja (Boland 1985:241; Feillard 1999:142-143).

c. Mendirikan organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai pembendung arus terhadap proses Kristenisasi

Para pemimpin Islam berharap dengan ikut sertanya dalam penumpasan PKI mereka dapat berperan banyak dalam perjalanan roda politik di Indonesia. Namun harapan ini kemudian disadari hanya merupakan khayalan belaka. Pada tahun 1962 Sukarno memenjarakan para pemimpin Masyumi, pada pemerintahan Suharto mereka dibebaskan namun tidak diijinkan untuk memimpin partai. Diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit dan tekanan-tekanan dari rezim Orde Lama maupun Orde Baru, Muhammad Natsir pemimpin Masyumi dan seorang tokoh Muslim puritan yang sangat kharismatik bersama dengan kawan-kawannya meninggalkan dunia partai dan terjun ke dalam usaha-usaha pendidikan, kesejahteraan, dan dunia dakwah. Mereka berharap memperkuat pengaruh Islam terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Mei 1967 mereka membentuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) (Feillard 1999:342; Liddle 1999:32; Bruinessen 2002).

Pembentukan DDII ini juga dilatarbelakangi oleh kecemasan mereka atas kemajuan kristenisasi dan itu dilihat sebagai ancaman bagi Islam, sehingga lembaga ini dimaksudkan untuk meresponi secara langsung ancaman pemurtadan, selain itu juga bersaing dengan pihak misionaris Kristen di sejumlah daerah (Hefner 2001:194-195; Bruinessen 2002). Sebagaimana diungkapkan Feillard berdasarkan wawancara dengan aktivis DDII: “Salah satu tema yang paling disorot adalah masalah “kristenisasi” di Indonesia” (Feillard 1999:343; ICG 2001:11). Bahkan mereka berpendapat bahwa orang Kristen menghalangi perkembangan Islam sejak kemerdekaan, ingin menguasai dunia politik dan intoleran (Feillard 1999:344). Isu lain yang menjadi sorotan DDII adalah dominasi komunitas Tionghoa atas perekonomian Indonesia (ICG 2001:11). DDII dikemudian hari menjadi “*a major support base for ‘fundamentalist’ thinking in Islamic circles*” (ICG 2001:11). Kelompok ini sangat menentukan bagi perkembangan hubungan Islam *vis-à-vis* Kristen di Indonesia pada masa Orde Baru.

d. Melalui jalur politik

Muhammadiyah melalui salah satu anggotanya Lukman Harun (anggota DPR) mengajukan interpelasi pada tanggal 10 Juli 1967 mengenai persoalan pertentangan Islam dengan Kristen. Ada tiga hal yang diajukan oleh

Lukman Harun: Pertama, mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengontrol dan mengatur prosedur pembangunan tempat-tempat ibadah; kedua, mengarahkan cara-cara dakwah agama yang benar, dan ketiga, menuntut agar bantuan asing dalam bentuk dana dan barang-barang material, hendaknya disalurkan melalui lembaga pemerintah (Shihab 1998:178).

Padatahun 1970-an tuntutan Lukman Harun mulai digenapi satu persatu oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri.

3.3. Kebijakan-kebijakan Pemerintah

Melihat potensi ketegangan yang semakin memuncak dan menurut Alwi Shihab sebagai tanggapan pemerintah atas tuntutan anggota DPR (1998:179) maka pada tanggal 30 November 1967 atas nama pemerintah Menteri Agama K.H. Muhammad Dachlan (seorang Muhammadiyah) mengadakan musyawarah antar agama di Jakarta (Boland 1985:244; Shihab 1998:179). Sebagai bahan acuan musyawarah tersebut pemerintah membuat suatu konsep piagam yang diberikan kepada Dr. J. Leimena, Ketua Umum DGI Dr. J.L. Ch. Abineno dan Ketua DGI T.B. Simatupang.²⁰ Adapun isi pokok piagam tersebut memutuskan tiga hal penting yaitu:

Menetapkan dibentuknya Badan Musyawarah Agama yang bertugas:

- a) Membantu Pemerintah untuk menyarankan usaha-usaha penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan umat beragama;
- b) Mengusahakan segala upaya yang bertujuan terciptanya saling pengertian dan saling menghormati antara semua umat beragama satu dengan yang lainnya;
- c) Saling membantu satu dengan lainnya, moril spiritual dan materil, dan berlomba-lomba untuk meyakinkan golongan atheis untuk berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menjadikan umat yang telah beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing-masing (Sairin, ed., 2000:100-101).

²⁰Tulisan ini berdasarkan dokumen yang dikumpulkan Weinata Sairin, *Departemen Agama dan Hubungan Agama-agama di Indonesia*, (Bandung: PT Danamartha Sejahtera Utama, 2000).

Adapun yang menjadi masalah bagi kelompok Kristen dalam ketetapan piagam di atas adalah poin c khususnya pada kalimat “tidak menjadikan umat yang telah beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing-masing”.

Sebelum diadakan musyawarah pada tanggal 30 November 1967 pada tanggal 28 November 1967 Menteri Agama mengundang wakil-wakil golongan Islam (Muhammad Natsir, Marzuki Jatim, K.H. Masjkur, Drs. Lukman Harun, Saleh Suadi, Rusli Halil, Mustafa Basir, Abdul Azis), dan wakil Kristen Protestan dan Katolik (Dr. A.M. Tambunan, S.H., T.B. Simatupang, Dr. S.A.E Nababan, Ds. W.J. Rumambi-I.J. Kasimo, B. Mang Reng Sai, Pater A. Hardo Widagdo O. Carm). Berdasarkan isi pidato sambutan dari DR. A.M. Tambunan, S.H. pada musyawarah antar agama pada tanggal 30 November 1967, sebenarnya sejak tanggal 28 November sudah mulai terjadi perdebatan antara kelompok Islam dengan kelompok Kristen tentang isi piagam terutama poin c. Kelompok Islam cenderung menerima isi piagam tersebut. Hal ini bisa dipahami karena piagam tersebut akan melindungi umat Islam dari sasaran kristenisasi. Sebaliknya kelompok Kristen merasa keberatan. Keberatan atas poin c tersebut jika dilihat dari isi pidato D.R. A.M. Tambunan, S.H. karena:

. . . sebagai orang-orang Kristen kami terikat kepada perintah Illahi yang antara lain dirumuskan sebagai berikut: “dan kamu akan menjadi saksi bagiKu, baik di Yerusalem, baik di seluruh Tanah Yudea atau di Samaria, sehingga sampai keujung bumi” (Kisah Rasul-rasul 1:8). Pada tempat lain dikatakan: “Pergilah keseluruh dunia dan maklumkanlah Injil kepada segala mahluk” (Markus 16:15) (Sairin, ed., 2000:118).

Keberatan dari kelompok Kristen ini tampaknya mendapat tanggapan dari pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari alternatif yang diberikan oleh pemerintah tentang isi piagam khususnya bagian c. Adapun alternatif isi piagam tersebut sebagai berikut:

- C.1. Berlakunya toleransi satu dengan yang lain dan tidak menjadikan umat yang telah beragama sasaran penyebaran agama masing-masing.
- C.2. Dengan tidak mengurangi hak azasi manusia dalam kebebasannya memilih agamanya masing-masing menjamin/menghindari cara-cara penyebaran agama masing-masing yang dapat mendatangkan prasangka seolah-olah akan saling merebut umat masing-masing.
- C.3. Dengan tidak mengurangi hak azasi manusia dalam kebebasannya memilih agamanya masing-masing menjamin berlakunya toleransi satu dengan yang lain dengan menghindari usaha-usaha penarikan umat masing-masing.
- C.4. Dengan tidak mengurangi hak azasi manusia dalam kebebasannya memilih agamanya masing-masing setiap golongan agama berlaku toleran satu terhadap lainnya, dan menghindarkan kegiatan-kegiatan penyebaran agama masing-masing yang dapat menimbulkan

sengketa-sengketa antara sesama umat beragama (Sairin, ed., 2000:105).

Dari ke empat alternatif ini kelompok Kristen memilih alternatif c-4. Pilihan ini dicantumkan dalam naskah pernyataan bersama sebagai pedoman bagi wakil-wakil Protestan dan Katolik pada musyawarah antaragama tanggal 30 November 1967.

Ketegangan antara wakil Islam dengan wakil Kristen tampak dalam pidato sambutan para wakil Islam dan wakil Kristen. Misalnya dalam pidato Rasjidi, dia menekankan bahwa dalam Islam memang dianjurkan untuk menghormati agama lain namun dalam batas jika tidak merongrong agama Islam (Sairin, ed., 2000:193). Dalam menanggapi pidato Tambunan, Rasjidi mengatakan:

Saya mengatakan bahwa walau pun bapak Doktor Tambunan mengatakan tidak ada, saya mengatakan ada. Saya baru saja selesai membaca buku karangannya dr (Sic). Hendrik Kraemer yang berjudul "*The Christian message in a non Christian world*" tugas Kristen dalam dunia bukan Kristen; dalam buku itu kita baca dengan jelas bagaimana rencana dan usaha Kristen untuk mengkristenkan Dunia dan khususnya Indonesia (Sairin, ed., 2000:194).

Sudah dapat diduga sejak awal bahwa musyawarah ini akan berakhir dengan tanpa hasil yang memuaskan. Pihak Kristen tetap menolak untuk menandatangani piagam terutama berkaitan dengan kalimat tidak menjadikan umat yang beragama sebagai sasaran penyebaran agama.

Dalam musyawarah ini juga terjadi perbedaan pendapat antara kelompok Islam dengan kelompok Kristen terutama tentang posisi kaum *abangan*. Menurut kelompok Islam kaum *abangan* secara formal sudah menjadi Islam tinggal dibersihkan dari unsur syirik atau bi'dah. Sebaliknya menurut kelompok Kristen, kaum *abangan* masih dianggap belum mempunyai agama sehingga berhak ditawarkan agama Kristen (Feillard 1999:143).

Musyawarah yang bertujuan untuk menyelesaikan ketegangan Islam-Kristen ini justru semakin membuat hubungan kedua agama tersebut semakin memanas. Hamka mengomentari penolakan kelompok Kristen sebagai berikut:

Bagi golongan Kristen musyawarah membawa hasil positif, sebab sejak merdeka sampai sekarang barulah mereka dapat mengatakan terus terang dihadapan pemimpin-pemimpin dan para pemuka Islam, ulama atau zu'amanya, bahwa mengkristenkan seluruh umat Islam adalah mission sacre mereka, tugas suci mereka. Kalau bangsa penjajah dahulu mengatakan bahwa mereka juga datang membawa mission sacre ke Indonesia, sekarang setelah penjajah tidak ada, tugas itu digantikan golongan Kristen bangsa kita sendiri, dengan diberi bantuan uang dan orang oleh Barat (Hasyim dikutip oleh Sairin 2000:215).

NU menyatakan bahwa umat lain tidak memiliki kejujuran dalam melaksanakan toleransi kehidupan beragama (Duta Masyarakat 21-12-1967).

Kegagalan musyawarah ini semakin menambah ketegangan yang baru antara pemeluk Islam dengan Kristen. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya literatur-literatur yang bersifat apologetik dan polemik paska-musyawarah antar agama.²¹ Bahkan Natsir mengatakan bahwa semenjak itu berlaku apa yang disebut dengan “*free fight for all*”, dengan “*survival of the fittest*” di bidang agama (1969:248). Pada segmen *grass roots* terjadi lagi perusakan gereja pada tahun 1968 di Jatibarang (Jawa Barat) (Naim 1983:73) dan awal tahun 1969 sebuah gereja Protestan di Slipi Jakarta dirusak (Natsir 1969:238). Insiden seperti ini juga terjadi di Purwodadi (Jawa Tengah) (Boland 1985:241). Natsir melihat bahwa insiden-insiden tersebut di atas disebabkan oleh: Usaha kristenisasi yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan uang dan pendirian gereja di lingkungan penduduk yang mayoritas Muslim. Misalnya di Slipi sudah ada 5 gereja untuk 350 orang Kristen di antara 36.650 orang Islam dan gereja-gereja tersebut berdiri tanpa izin dari pemerintah (1969:238). Untuk menghindari agar insiden-insiden tersebut tidak terulang kembali Natsir menyarankan:

1. Golongan Kristen –tanpa mengurangi hak dakwah mereka untuk “membawa pekabaran Injil sampai ke ujung bumi- supaya menahan diri daripada maksud dan tujuannya dari program kristenisasi itu.
2. Orang Islam pun harus dapat menahan diri, jangan cepat-cepat untuk melakukan tindakan-tindakan fisik. Tapi ini hanya bisa, apabila orang Kristen pun dapat menahan diri.
3. Sementara itupun pemerintah harus bertindak cepat dalam hal pihak Kristen telah tidak mematuhi larangan-larangan pemerintah, agar pada orang Islam tidak timbul perasaan tidak berdaya, seolah-olah mereka tidak mendapat perlindungan dan jaminan hukum terhadap rong-rongan pihak lain (1969:239-240).

Di mata orang-orang Muslim kegiatan misi orang-orang Kristen merupakan pelanggaran terhadap Pancasila. Menurut orang Muslim Pancasila bagi orang-orang Kristen bukanlah Pancasila tetapi *Pancasalah* atau *Pencaksilat* (Kim 1998a:264). Rasjidi mengkritik kegiatan misi Kristen di Indonesia dengan ungkapan bahwa orang-orang Kristen di Indonesia adalah *Kristen beras* (orang menjadi Kristen bukan karena percaya tetapi karena materi).

Umat Islam merasa bahwa pemerintah terkesan mengacuhkan kegelisahan mereka (Suhadi 2002), meskipun sebenarnya sudah ada campur tangan dari pemerintah dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. Peraturan ini

²¹Abujamin Roham, *Agama-agama Kristen dan Islam Serta Perbandingannya*, Jakarta, 1968. Hazairin, *Isa Almasih dan Ruh*, Jakarta, 1969. H. M. Rasjidi, *Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam*, tk: Penerbit HUDAYA dan Penerbit ANGKASA, 1968.

dikeluarkan untuk menentukan bahwa sebelum sebuah tempat ibadah dapat dibangun, persetujuan harus didapat dari penduduk lokal yang tinggal dekat tempat pembangunan, dan sebuah ijin harus diperoleh dari kantor wilayah kementerian agama. Sebagian umat Kristiani mengklaim bahwa peraturan ini digunakan untuk mendiskriminasi mereka dan mencegah mereka untuk membangun gereja-gereja. Sedangkan Umat Islam berpendapat bahwa umat Kristiani, dalam beberapa hal, sengaja mendirikan gereja-gereja di daerah-daerah dengan populasi umat Kristiani yang sedikit dengan tujuan untuk menciptakan sebuah basis di daerah umat Islam untuk menarik mereka masuk agama Kristen.

4. Kesimpulan

Sejak masa awal kemerdekaan sampai masa munculnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 banyak diliputi ketegangan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Perjumpaan antara kedua kekuatan tersebut terjadi misalnya dalam perumusan dasar negara RI yang akan dibentuk. Kelompok Islam menghendaki Syariat Islam sedang kelompok yang lain menghendaki dasar negara yang bebas dari primordialisme agama yaitu Pancasila.

Debat tentang dasar negara tersebut kemudian diakhiri dengan satu *modus vivendi* dengan merumuskan *gentlemen's agreement* tentang Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Namun sehari setelah Indonesia merdeka atas keberatan dari kelompok nasionalis dan Kristen dari Indonesia Timur maka ketujuh kalimat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut dihapus. Pada saat inilah bibit ketegangan antara Islam dengan Kristen mulai muncul. Setelah Pemilu 1955 debat tentang dasar negara mencuat kembali, karena tidak terdapat kompromi tentang dasar negara maka Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.

Tahun 1950-an terjadi kebangkitan gerakan aliran kepercayaan, penganut gerakan ini menjadi basis utama bagi penggalangan masa Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI merupakan lawan utama bagi orang-orang Islam maupun politik Islam. Ketika PKI gagal mengadakan revolusi pada tahun 1965 maka banyak orang-orang Islam yang membantu Angkatan Darat dalam menumpas para pengikut PKI. Karena sakit hati maka banyak para pengikut PKI yang *abangan* –ketika pemerintah mengharuskan rakyat Indonesia memeluk agama yang disahkan oleh pemerintah- yang memilih memeluk agama Kristen. Sehingga terjadi konversi ke Kristen secara masif. Kejadian ini menimbulkan kecemasan dan keterancaman dari kalangan Islam sehingga konflik fisik dan konflik lewat media tidak dapat dihindarkan.

Konversi ke Agama Kristen dikalangan orang *abangan* ini juga telah menggeser kelompok yang dianggap musuh atau ancaman bagi Islam, jika sebelumnya yang dianggap musuh utama adalah *abangan* maka mulai pertengahan tahun 1960-an bergeser ke Kristen. Kekristenan dianggap musuh sekaligus ancaman bagi kelompok Islam sehingga sejak awal Orde Baru sudah

terjadi perang dingin di antara kedua kelompok agama tersebut dan diakhiri dengan konflik terbuka menjelang akhir rezim Orde Lama.

Tentang Penulis

Amos Sukanto adalah direktur program pasca-sarjana di STT INTI dan dosen tamu di STT Bandung. Ia menyelesaikan pendidikan Master of Divinity pada tahun 1996 di Asian Center for Theological Studies and Missions di Seoul, Korea Selatan, dan Doctor of Theology pada tahun 2007 di Consortium for Graduate Program in Christian Studies di Bandung, Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal
2009 "PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama." *Al-Q n n*. Vol. 12, No. 2 (Desember).
- Anderson, Benedict R. O'G
2000 Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia. Revianto Budi Santoso, trans. Yogyakarta: Mata Bangsa. (Asli: Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, Ithaca, New York, 1990).
- Anshari, Endang Saifuddin
1997 Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949). Jakarta: Gema Insani Pers.
- Bakri, Hasbullah
1990 Pandangan Islam tentang Kristen di Indonesia. Jakarta: C.V. Firdaus.
- Beatty, Andrew
2001 Variasi Agama Jawa: Suatu Pendekatan Antropologi. Jakarta: Murai Kencana.
- Boland, B. J.
1985 Pergumulan Islam di Indonesia. Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Bruinessen, Martin van
1999 Rakyat Kecil, Islam dan Politik (Bab 7: Negara Islam atau Islam Negeri? Lima Puluh Tahun Hubungan Islam-Negara di Indonesia). Yogyakarta: Bentang.

- 2002 "Genealogies of Islamic Radicalism in post-Suharto Indonesia." Online. Internet. (Available from <http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen>). Akses 1 Mei 2003.
- Cooley, F. L.
1968 Indonesia: Church and Society. New York: Friendship Press.
- Coppel, Charles A.
1994 Tionghoa Indonesia Dalam Krisis. Jakarta: Sinar Harapan.
- Crouch, Harold
1999 Militer & Politik di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dick, C. van
1981 Rebellion Under the Banner o Islam: The Darul Islam in Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Fealy, Greg
2003 Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta: LKiS.
- Feillard, Andrée
1999 NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yoyakarta: LKiS.
- Geertz, Clifford
1960 The Religion of Java. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Gonggong, Anhar
1992 Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Pejuang Sampai Pemberontak. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Haanie, A.D.
1925 Islam Menentang Kraemer. Yogyakarta: Penyiaran Islam.
- Hatta, Mohammad
1978 Memoir. Jakarta: Tintamas.
- Hefner, Robert W.
1985 Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam. Princeton: Princeton University Press.
- 1993 "Of Faith and Commitment: Christian Conversion in Muslim Java," dalam Hefner, R. W. ed., Conversion to Christianity: Historical and

- Anthropological Perspectives on a Great Transformation. Berkeley: University of California Press.
- 2001 Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: ISAI.
- Husaini, Adian
2002 “Syariat Islam di Indonesia: Problem Masyarakat Muslim Kontemporer.” Tashwirul Akar. 12:57-73.
- International Crisis Group
2001 “Indonesia: Violence and Radical Muslims.” Indonesia Briefing (10 October):1-18.
- Jones, Gavin W.
1985 “Agama-agama di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya.” Dalam Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984. Jakarta: LP3ES.
- Kim, Hyung Jun.
1998a “The Changing Concept of Religious Freedom.” Journal of Southeast Asian Studies 29 (2): 357-373.
1998b “Unto You Your Religion and Unto Me My Religion: Muslim-Christian Relations in a Javanese Village’s.” Sojourn 13 (1):62-85.
- Kroef, J. M. van der
1961 “New Religious Sects in Java.” Far Eastern Survey 30
- Langenberg, Michael van
2000 “Gestapu dan Kekuasaan Negara di Indonesia.” Dalam The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Robert Cribb, ed. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Latif, Yudi
2005 Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20. Bandung: Mizan.
- Liddle, R. William
1999 “Indonesia’s Unexpected Failure of Leadership.” Dalam The Politics of Post-Suharto Indonesia. Adam chwarz dan Johnathan Paris, eds. Pp. 1-15. Singapore: Rafles.
- Maarif, Ahmad Syafii
1985 Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.

Mortimer, Rex Alfred

- 1972 The Indonesian Communist Party and Land Reform, 1959-1965. Monash Papers on Southeast Asia No. 1. Clayton, Victoria: Monash University.

Mulder, Niels

- 1984 Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil. Jakarta: PT Gramedia

Naim, Sahibi

- 1983 Kerukunan Antar Umat Beragama. Jakarta: Gunung Agung.

Nasution, Adnan Buyung

- 1992 The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Natsir, M.

- 1969 Islam dan Kristen di Indonesia. Bandung: Peladjar dan Bulan Sabit.
1991 "Tanpa Toleransi Tak-kan Ada Kerukunan." Dalam Fakta & Data Usaha-usaha Kristenisasi di Indonesia. Lukman Hakiem, ed. Jakarta: Majalah media Dakwah.

Poeze, Harry A.

- 2011 Madiun 1948: PKI Bergerak. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Pranowo, M. Bambang

- 1993 "Partai Politik dan Islamisasi di Pedesaan Jawa." Dalam Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Saiful Muzani, ed. Hal. 178-195. Jakarta: LP3ES.

Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada

- 2000 "Aksi Kekerasan di Pedesaan Klaten dan Banyuwangi." The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Ropi, Ismatu

- 1999 "Depicting the Other Faith: A Bibliographical Survey of Indonesia Muslim Polemics on Christianity" Studia Islamika 6, 1:77-120.

Sairin, Weinata, ed.

- 2000 Departemen Agama dan Hubungan Agama-agama di Indonesia. Bandung: PT Danamartha Sejahtera Utama.

Shihab, Alwi

1998 Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia. Bandung: Mizan.

Stange, Paul

1998 Politik Perhatian: Rasa Dalam Kebudayaan Jawa. Yogyakarta: LKiS.

Subagya, Rahmat

1989 Kepercayaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan dan Agama. Yogyakarta: Kanisius.

Tholkhah, Imam

2001 Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar Dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro. Jakarta: Rajawali Pers.